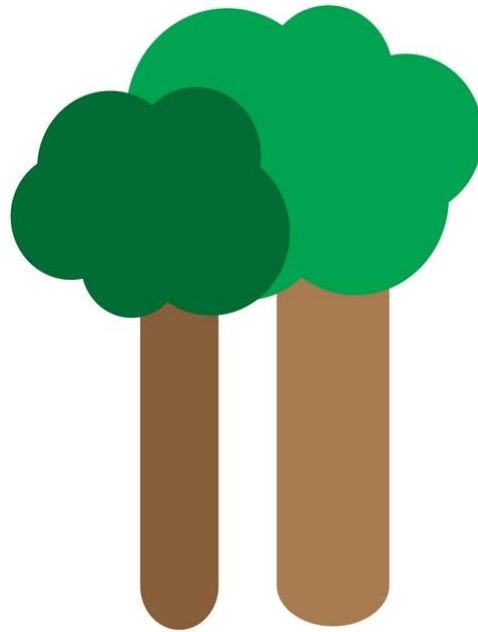


# EXECUTIVE SUMMARY



DOKUMEN INFORMASI KINERJA

# **PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BOGOR 2017**



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR

JL PALEDANG NO 43 KOTA BOGOR





## WALIKOTA BOGOR

### **Kata Pengantar**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan perlu didukung data dan informasi lingkungan hidup yang akurat, lengkap dan berkesinambungan. Informasi tersebut harus menggambarkan keadaan lingkungan hidup, tekanan yang terjadi terhadap lingkungan hidup dan permasalahan yang timbul, sehingga Pemerintah dapat menentukan kebijakan yang akan diambil dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Kota Bogor atau yang dulu disebut Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), yang merupakan laporan tahunan tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Laporan tersebut harus menggambarkan keadaan lingkungan hidup baik penyebab dan dampak permasalahannya maupun respon Pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

DIKPLH disusun untuk memenuhi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bab VIII tentang Sistem Informasi pasal 62 ayat (1-3) yang menjelaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan

secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) ini merupakan sarana yang penting untuk mengkomunikasikan keadaan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keadaan lingkungan serta membantu pengambil keputusan menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan.

DIKPLH Kota Bogor menjadi sangat penting karena menyajikan perubahan penduduk dengan kualitas dan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk. Keterbatasan lingkungan dan teknologi mengharuskan tekanan terhadap lingkungan dikendalikan agar tidak terjadi bencana ekologi. Kesadaran agar lingkungan tetap berlanjut untuk menopang pembangunan akan dapat dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya. Informasi tentang tekanan, kondisi dan upaya yang dilakukan terhadap lingkungan mulai dari Kabupaten/Kota dan Provinsi diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam membuat perencanaan lingkungan, baik pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, maupun Nasional. Informasi ini pula akan memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dalam penyusunan DIKPLH Kota Bogor Tahun 2017 digunakan pendekatan P-S-R (Pressure, State, Response) yang mengacu kepada Standar Internasional dalam penulisan laporan sejenis serta berdasarkan pada penyempurnaan pedoman penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) 2017. DIKPLH Kota Bogor Tahun 2017 menggambarkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bogor selama Tahun 2017, antara lain tekanan dan dampak lingkungan hidup, kondisi kualitas lingkungan hidup, dan berbagai respon atau upaya yang dilakukan baik

oleh Pemerintah atau masyarakat dalam bentuk kebijakan maupun program untuk menangani dampak lingkungan yang terjadi.

Penyusunan Laporan DIKPLH ini merupakan hasil pengkajian keadaan lingkungan hidup guna memberikan gambaran atas dampak kegiatan manusia dan alam yang terjadi terhadap lingkungan hidup di Kota Bogor. Laporan DIKPLH ini selain sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan di Kota Bogor juga bermanfaat bagi masyarakat secara umum, bagi pengusaha, peneliti dan pemerhati lingkungan hidup di Kota Bogor.

Atas diterbitkannya Laporan DIKPLH ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Instansi/Dinas/Lembaga dan Konsultan serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan DIKPLH ini. Semoga Laporan DIKPLH ini dapat menjadi bahan masukan yang baik bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bogor,           Maret 2018

**PLT. WALIKOTA BOGOR**

**Ir. USMAN HARIMAN**

# **Bab I Pendahuluan**

## **1.1. Latar Belakang**

Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dilakukan setiap tahun oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar dari Penghargaan Nirwasita Tantra. Pemberian penghargaan Nirwasita Tantra bertujuan untuk mendorong para Kepala Daerah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan/atau program di daerahnya yang menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Latar belakang penulisan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Bogor merupakan bagian dari Rencana Kerja Jangka Panjang dan Menengah Pemerintah Kota Bogor sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015–2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014, serta Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor .

## **1.2. Profil Atau Keadaan Umum Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor No.13 Tahun 2008, wilayah Kota Bogor mencakup 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kota Bogor memiliki luas wilayah 11.850 ha yang terletak pada 106°43'30" Bujur Timur sampai dengan 106°51'00" Bujur Timur dan 6°30'30" Lintang Selatan sampai dengan 6°41'00" Lintang Selatan. Secara keseluruhan wilayah administrasi Kota Bogor dibagi menjadi 6 kecamatan dan 68 kelurahan, 750 RW dan 3.349 RT.

## **1.3. Gambaran Singkat Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas**

Isu prioritas diperoleh berdasarkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat yang berada di Kota Bogor dan kemudian dilakukan pendataan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). Hasil pendataan tersebut kemudian dilakukan FGD untuk menentukan isu prioritas tahun 2017. Selanjutnya hasil

FGD isu prioritas tersebut ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor (RPJMD). Penetapan Isu prioritas Kota Bogor meliputi :

- 1) Pertumbuhan Penduduk tidak sebanding dengan Daya Tampung Lahan dan Daya Tampung Ruang.
- 2) Kemacetan Lalu Lintas yang berpotensi terhadap penurunan kualitas udara
- 3) Pengelolaan Sampah Yang Belum Terpadu.

Ketiga isu prioritas di atas merupakan isu-isu yang menjadi permasalahan utama di Kota Bogor yang harus segera tertangani pada tahun 2017.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah bermaksud untuk sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Daerah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, dan/atau program yang berwawasan lingkungan di Kota Bogor.
- 2) Sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup bagi seluruh stakeholder.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan kefahaman akan kecenderungan dan kondisi lingkungan.
- 2) Memfasilitasi pengukuran kemajuan menuju keberlanjutan.
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bogor.

#### **1.5. Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang Lingkup Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dimulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan laporan hingga penyampaian dokumen laporan ke Kementerian LHK. Penyusunan laporan merupakan inti dari *business process* yang selanjutnya mengacu pada Pedoman penyusunan yang terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK.

# **Bab II Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah**

## **2.1. Deskripsi Kondisi Kota Bogor**

Kota Bogor yang menjadi daerah penyangga ibukota, mempunyai ciri khas tersendiri pada aktivitas dan mobilitas penduduk. Aktivitas di Kota Bogor rata-rata berpusat di pusat kotanya (Kecamatan Bogor Tengah). Pusat Kota Bogor saat ini adalah sekitar Kebun Raya yang dikelilingi oleh Jalan Pajajaran, Jalan Jalak Harupat, Jalan Ir. H Juanda, Jalan Otto Iskandardinata, melebar ke Jalan Suryakencana, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Sudirman, dan Jalan RE Martadinata.

Pada pusat kota tersebut terdapat fasilitas transportasi sebagai penunjang bagi kegiatan penduduk Kota Bogor dan kawasan sekitar Kota Bogor. Fasilitas tersebut berupa Terminal Tipe A, yaitu Terminal Baranangsiang dan Stasiun Kereta Api Bogor.

## **2.2. Proses Perumusan Isu Prioritas**

Penyusunan isu prioritas Kota Bogor dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Isu prioritas diperoleh berdasarkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat yang berada di Kota Bogor dan kemudian dilakukan pendataan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). Hasil pendataan tersebut kemudian dilakukan FGD untuk menentukan isu prioritas tahun 2017. Selanjutnya hasil FGD isu prioritas tersebut ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor (RPJMD). Penetapan Isu prioritas Kota Bogor meliputi :

- 1) Pertumbuhan Penduduk tidak Sebanding dengan Daya Tampung Lahan dan Daya Tampung Ruang.
- 2) Kemacetan Lalu Lintas yang berpotensi terhadap penurunan kualitas udara.
- 3) Pengelolaan Sampah Yang Belum Terpadu.



### **2.3. Analisis yang Digunakan Dalam Penetapan Isu Strategis**

1) *Pertumbuhan Penduduk tidak Sebanding dengan daya tampung lahan dan daya tampung ruang.*

Pertumbuhan penduduk Kota Bogor cukup tinggi, hal ini ditunjukkan pada jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2015 adalah sebanyak 10.347.922 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2015 bertambah sebanyak 17.202 jiwa atau meningkat sebanyak 1,67 persen. Dengan luas wilayah 118,50 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Kota Bogor pada tahun 2015 mencapai 8.843 jiwa per Km<sup>2</sup>.

2) *Kemacetan lalu lintas yang berpotensi terhadap penurunan kualitas udara*

Kemacetan lalu lintas yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh kuantitas angkutan umum yang terlalu banyak, kurangnya kualitas angkutan umum, kurangnya pelayanan angkutan umum massal, keterbatasan sistem jaringan jalan, penyalahgunaan badan jalan dan trotoar, tidak adanya atau tidak berfungsinya lampu pengatur lalu lintas, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

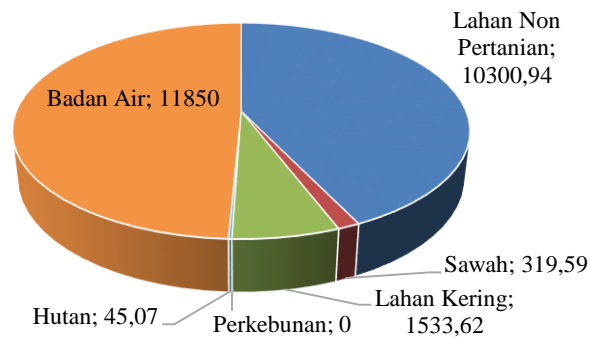
3) *Pengelolaan sampah yang belum terpadu.*

Mencakup permasalahan volume timbulan sampah, pola pelayanan pengelolaan sampah, regulasi dan penegakan hukum, minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan masalah TPPA.

## **Bab III Analisis Pressure, State, dan Response Isu**

### **3.1. Tata Guna Lahan**

Secara umum, penggunaan lahan dikelompokkan menjadi lahan non pertanian, sawah, lahan kering, perkebunan, lahan hutan dan badan air. Gambar berikut ini menyajikan secara lengkap penggunaan lahan di Kota Bogor:



### Penggunaan Lahan di Kota Bogor

#### 3.2. Kualitas Air

Kota Bogor dialiri oleh dua sungai besar dan tujuh anak sungai yang secara keseluruhan membentuk pola aliran paralel-subparalel yakni sungai Ciliwung dan sungai Cisadane. Kedua sungai ini dimanfaatkan Kota Bogor sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Secara hidrologis Kota Bogor berada pada tiga Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cimahpar, DAS Cikereti, dan DAS Kali Baru. Penggunaan lahan di sekitar DAS Ciliwung dan Cisadane di wilayah Kota Bogor didominasi kawasan terbangun. DAS Ciliwung dan Cisadane di Kota Bogor merupakan kawasan Kota yang terus berkembang, terjadi perubahan pemanfaatan lahan ruang terbuka menjadi areal terbangun (perumahan, perdagangan, perkantoran dan industri).

##### 1) Sungai Ciliwung

Sungai Ciliwung memiliki panjang total sekitar 117 Km dan melingkupi luas areal sekitar 257.000 Ha yang mengalir dari arah selatan (Cisarua) ke utara (Jakarta). Data hasil analisis kualitas air sungai Ciliwung tahun 2017 menunjukkan bahwa kualitas air di lokasi bagian hulu, tengah, dan hilir sungai Ciliwung kurang memenuhi persyaratan untuk pemanfaatan air kelas II.

##### 2) Sungai Cisadane

Aliran sungai Cisadane berawal dari wilayah Bogor Selatan (Kelurahan Rancamaya) ke arah Bogor Tengah dan Bogor Barat sepanjang sekitar 31,04 Km dengan debit rata-rata tahunan sekitar 2,4 m<sup>3</sup>/detik. Selama ini Sungai Cisadane merupakan sumber air baku PDAM Kota Bogor setelah melalui proses pengolahan. Pada tahun 2016 telah dilakukan

pengukuran keadaan kualitas air sungai Cisadane di tiga lokasi yang mewakili bagian hulu, tengah dan hilir. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kualitas air di lokasi bagian hulu, tengah dan hilir sungai Cisadane kurang memenuhi baku mutu untuk pemanfaatan kelas I.

### 3) *Sungai Angke*

Kualitas air sungai Angke berada di atas baku mutu air kelas 3 berdasarkan titik pantau yang mewakili hulu, tengah, hingga hilir.

Selain sungai, terdapat tiga buah situ alami yang berada di Kota Bogor, tepatnya berada di Kecamatan Bogor Barat yaitu Situ Gede, Situ Panjang, dan Situ Anggalena. Masalah utama kualitas air situ di Kota Bogor adalah tingginya parameter Total Coliform. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai, dan melakukan aktivitas sehari-hari di sungai.

## **3.3. Kualitas Udara**

### 1) *Kondisi Udara di Kota Bogor (State)*

Hasil pemantauan suhu udara di Kota Bogor yang dilakukan di dua lokasi yaitu Atang Sanjaya dan Klimatologi Dramaga, menunjukkan bahwa suhu udara rata-rata bulanan di Atang Sanjaya berkisar antara 22,5° C – 27° C. Sedangkan di Klimatologi Dramaga, suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 24,6° C hingga 26,8° C. Parameter-parameter kualitas udara di Kota Bogor relatif tidak membahayakan bagi lingkungan, karena gas-gas dan partikulat tersuspensi yang dihasilkan pada umumnya masih di bawah ambang batas baku mutu kualitas udara ambien.

### 2) *Tekanan Terhadap Kualitas Udara Kota Bogor (Pressure)*

Perkembangan Kota Bogor yang pesat serta sebagai kota penyangga ibukota DKI Jakarta menyebabkan Kota Bogor sangat pesat dalam peningkatan jumlah kendaraan yang beredar. Jumlah penjualan kendaraan di Kota Bogor sebanyak 659 unit yang terdiri dari jenis kendaraan bus dan truck. Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Bogor mengakibatkan penurunan kualitas udara. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengukuran kualitas udara ambien, dimana Kadar Timbal (Pb) yang berasal dari kendaraan bermotor sudah melampaui Baku mutu.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2017, terdapat peningkatan jumlah penderita penyakit pernapasan seperti penyakit ISPA, nasoparangitis, faringitis akut dari tahun 2015 hingga 2017 dimana jumlah penderita penyakit nasoparingitis akut dan pharingitis akut mengalami peningkatan yaitu 7.904 penderita dan 2.862 penderita. Penderita penyakit nasopharigitis akut tahun 2016 dan 2017 memang mengalami penurunan, namun sangat sedikit apabila dibandingkan peningkatannya dari tahun 2015 hingga 2016.

### *3) Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kota Bogor (Response)*

Untuk menjaga Kota Bogor dari peningkatan suhu udara khususnya perubahan iklim mikro, maka secara mutlak kegiatan penghijauan secara terus-menerus perlu dilakukan. Oleh karena itu keberadaan RTH sangat dibutuhkan. Pemerintah Kota Bogor telah menambah luas taman kota dari seluas 217,5 ha menjadi seluas 310,26 ha. Upaya lainnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor khususnya DLH dalam rangka menjaga kualitas udara adalah dengan Sosialisasi Pengujian Kualitas Udara yang ditujukan bagi pelaku usaha atau swasta yang kegiatan usahanya menghasilkan pencemaran udara dan pelajar.

## **3.4. Resiko Bencana**

### *1) Bencana Longsor*

Bencana longsor kerap terjadi di Kota Bogor. Sepanjang tahun 2017 telah terjadi sebanyak 13 kejadian dengan perkiraan total kerugian materil sebesar Rp888.000.000, namun tidak terdapat korban jiwa.

### *2) Bencana Banjir*

Sepanjang tahun 2017, terjadi bencana banjir sebanyak 3 kejadian yang terjadi di Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Selatan dengan perkiraan kerugian sebesar Rp100.000.000.

### *3) Bencana Kebakaran*

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, sepanjang tahun 2017 tercatat sebanyak 6 kejadian kebakaran dengan perkiraan total kerugian materil sebesar Rp1.545.000.000.



Berdasarkan matriks penentuan tingkat kerugian diatas dapat disimpulkan bahwa potensi tingkat kerugian akibat multibencana di Kota Bogor sebagai berikut.

- Tingkat kerugian TINGGI (tingkat ancaman tinggi dan indeks kerugian tinggi) berpotensi terjadi apabila terjadi bencana longsor dan kebakaran.
- Tingkat kerugian TINGGI (tingkat ancaman sedang dan indeks kerugian tinggi) berpotensi terjadi apabila terjadi bencana banjir dan pohon tumbang.
- Tingkat kerugian TINGGI (tingkat ancaman sedang dan indeks kerugian tinggi) berpotensi terjadi apabila terjadi bencana banjir dan pohon tumbang.
- Tingkat kerugian SEDANG (tingkat ancaman rendah dan indeks kerugian tinggi) berpotensi terjadi apabila terjadi bencana angin puting beliung, KRB Gunungapi, dan kegagalan teknologi.
- Tingkat Kerugian RENDAH (tingkat ancaman rendah dan indeks kerugian rendah) berpotensi terjadi apabila terjadi bencana kekeringan, gempa bumi, dan wabah penyakit.

### **3.5. Perkotaan**

#### *1) Kondisi dan Permasalahan Perkotaan*

- Laju pertumbuhan penduduk.
- Peningkatan konsentrasi penduduk perkotaan pada pusat-pusat kawasan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
- Peningkatan kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bogor

#### *2) Upaya Penanganan Masalah Perkotaan*

- Aspek Kelembagaan
- Rencana Pengelolaan Sampah Regional

## **Bab IV Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

### **4.1. Pemukiman Vertikal Untuk Menanggulangi Pertumbuhan Penduduk Tidak Sebanding Dengan Daya Tampung Lahan dan Ruang**

Kota Bogor sebagai kota hunian yang menyangga Ibu Kota tidak luput dari urbanisasi. Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di DKI Jakarta menjadikan Kota Bogor sebagai lokasi hunian. Kebijakan pembangunan permukiman di Kota Bogor saat ini diarahkan kepada permukiman vertikal. Tujuan pembangunan permukiman vertikal bertujuan untuk mengurangi penggunaan lahan yang berlebihan yang dimiliki Kota Bogor. Saat ini di Kota Bogor telah banyak berdiri rumah susun dan apartemen.

### **4.2. Pembangunan Taman Tematik Untuk Menanggulangi Penurunan Kualitas Udara**

Pada Tahun 2017 ada 11 taman kota yang telah dibangun Pemerintah Kota Bogor. Adapun taman-taman yang telah dibangun di tahun 2017 adalah :

- Taman Durian Bantar kemang
- Taman Mandalawangi
- Taman Manjabal
- Taman Tebing Sempur
- Taman Lereng CPM, Jalan Jalak Harupat
- Taman Bubulak
- Taman Sempur Kaler
- Taman Cipaku
- Taman Simpang Jalan Ir H Djuanda – Jalan Kapten Muslihat.
- Taman Villa Bogor Indah (VBI), Kedung Halang
- Taman Tirta Cimanggu.

### **4.3. Pelebaran Jalan dan Relokasi Pedagang Pasar Bogor**

Untuk mengurangi tingkat kemacetan terutama di Jalan Otto Iskandardinata (OTISTA) Pemerintah Kota Bogor melakukan inovasi dengan merelokasi pedagang untuk masuk ke dalam Pasar Bogor, melakukan penertiban badan jalan dan trotoar yang disalahgunakan untuk kegiatan usaha yang mengganggu arus pejalan kaki dan estetika lingkungan dan sekaligus melakukan pelebaran jalan agar dapat mengurangi kemacetan di Jalan Otista.

### **4.4. BASIBA (Bank Sampah Berbasis Aparatur) Untuk Pengelolaan Sampah**

BASIBA atau Bank Sampah Berbasis Aparatur merupakan salah satu inovasi program dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pada awalnya BASIBA ini hanya diperuntukkan untuk pengelolaan sampah di aparaturnya Kota Bogor. Bank Sampah Induk ini saat ini telah melayani 233 Bank Sampah Unit atau bank sampah yang ada di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW). Dengan dibantu armada mobil pick up yang dimiliki Bank Sampah Induk dapat mengumpulkan sampah yang dapat di daur ulang sebanyak 300-500 kg/hari dari sebanyak 32 jenis sampah anorganik yang diterima.

### **4.5. Upaya Pengurangan Sampah Melalui TPS 3R dan Bank Sampah**

Upaya pengurangan timbulan sampah yang telah dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan sektor informal yang berada dalam sistem pengangkutan sampah Kota Bogor, belum dapat diketahui jumlah timbulan sampah yang dapat berkurang. Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) juga merupakan faktor yang sangat penting dalam pengurangan volume sampah. dapat diketahui bahwa 1 unit TPS 3R rata-rata dapat melayani 8 hingga 9 RT dengan total penduduk sekitar 2.840 jiwa. Terdapat sebanyak 23 unit TPS 3R di Kota Bogor yang telah melayani sebanyak 13.113 rumah/KK yang berada di 165 RT di Kota Bogor. Hingga saat ini, jumlah bank sampah yang telah memiliki Surat Keputusan dari masing-masing Lurah adalah sebanyak 80 bank sampah.



#### **4.6. Penataan Pedestrian**

Strategi dan arah kebijakan penanganan transportasi dan angkutan umum sesuai misi ketiga pada RPJMD tahun 2015-2019 adalah mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan berdasarkan pada peningkatan kenyamanan dalam berjalan kaki yang ramah bagi setiap kalangan. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor adalah dengan mengembangkan jalur pedestrian di sepanjang Kebun Raya Bogor. Jalur pedestrian tersebut dapat difungsikan untuk para pejalan kaki, selain itu juga jika cocok dimanfaatkan untuk berlari dan bersepeda. Lebih dari itu, jalur pedestrian ini bahkan ramah bagi warga difabel dengan dilengkapi jalur khusus pesepeda dan jalur bagi para difabel, serta didukung oleh pemandangan sekelilingnya yang asri, bersih, dan nyaman. Tidak hanya itu, jalur pedestrian di sepanjang Kebun Raya Bogor dilengkapi fasilitas yang berada jalur Pejalan Kaki Kebun Raya Bogor, yaitu:

- Memiliki lingkaran sepanjang 4,2 KM.
- Memiliki beberapa titik Wi-Fi yang mengitari Kebun Raya Bogor.
- Untuk keamanan terdapat patroli dari tim kancil yang merupakan gabungan Pol PP, Dishub, dan Polantas.